

# Kepemimpinan Perempuan: Antara Stereotip dan Potensi

written by Thau'am Ma'rufah



[Harakatuna.com](http://Harakatuna.com) - Perdebatan tentang boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin baik itu dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun sebagai pemimpin negara masih menjadi perdebatan panjang dalam berbagai forum kajian. Pertanyaan mendasar yang seringkali memancing diskusi adalah tentang kompetensi perempuan. Apakah dia mampu menduduki posisi tersebut serta mengelola suatu lembaga atau organisasi dengan berbagai dinamika dan tantangannya.

Banyak pihak menyangsikan kemampuan perempuan dalam mengemban peran kepemimpinan yang mampu memberikan dampak signifikan pada nilai unggul organisasi atau lembaga. Kebimbangan akan hal tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan. Pertimbangan mengenai kapasitas personal, kompetensi hingga unsur ajaran agama menjadi pengaruh penting.

Tidak bisa dipungkiri bahwa stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia masih memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Kultur masyarakat yang masih patriarkis menjadi dilema yang antialogis dan menjadi polemik ketika kemudian dibenturkan dengan nilai dan pemahaman agama.

Sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia masih terkungkung dengan pemahaman literal dari hadis Imam Bukhari yang berbunyi: *“Tidak akan sukses (sejahtera) suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada perempuan”*. Teks hadis tersebut kemudian dimaknai sebagai bentuk final.

Padahal hadis tersebut sudah banyak didiskusikan para ulama dengan pendapat yang beragam sehingga tidak bisa dikatakan bahwa larangan perempuan memimpin sebuah negara, organisasi, atau komunitas adalah pandangan mutlak dalam Islam.

Pemahaman tersebut kemudian secara tidak langsung memunculkan stereotip yang menghambat peran perempuan di wilayah publik. Selanjutnya, kita mengenal istilah *Glass Ceiling*, yaitu fenomena sosial ketika perempuan mengalami hambatan tak kasat mata untuk berkarir. Dalam hal ini, bias dan prasangka menjadi salah satu faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan.

Perempuan yang ambisius seringkali dianggap tabu dan aneh di lingkungan kerjanya, belum lagi pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan emosional dalam memimpin. Walaupun sebagian kalangan sudah mulai terbuka pada kepemimpinan perempuan, tetapi masih cenderung bersyarat. Seperti misalnya harus menjalankan pekerjaan domestik terlebih dahulu, tidak melanggar kodrat yang bersifat lahiriah serta tidak mengatur dan mendominasi laki-laki,

Bahkan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan pertama di Indonesia mengakui bahwa stereotip yang diberikan kepada perempuan menjadi dilema dan beban ganda yang harus ditanggung perempuan. Menurutnya, ketika seseorang ditempatkan di posisi penting tertentu, seperti ada kewajiban bagi perempuan tersebut untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkannya. Bahkan lebih beratnya lagi, dia dituntut harus dua kali lebih baik dari laki-laki.

Stereotip tersebut kemudian menjadi persepsi yang tidak adil bagi perempuan. Hal tersebut pada akhirnya akan memberikan pengaruh negatif yang dapat mengakibatkan gangguan kepercayaan diri pada perempuan dalam memimpin sebuah komunitas sehingga mengganggu kualitas perempuan dalam memimpin.

Pemahaman agama yang masih berpendapat bahwa perempuan tidak punya

tempat dalam mengatur umat agaknya perlu untuk di *rethinking*. Karena dalam kitab suci Al-Qur'an pun disebutkan bagaimana seorang ratu Balqis mampu memimpin kerajaan besar, mampu berpikir lincah, cerdas, bersikap hati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam perjalanan sejarah Islam pun terdapat kisah mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan.

Hadis yang dijadikan landasan mengenai ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin seharusnya juga dipahami secara kontekstual. Dalam perspektif mubadalah, sesungguhnya hadist ini berbicara mengenai kepemimpinan seseorang dalam usia yang tidak matang, belum memiliki kapasitas yang cukup dan tidak memiliki dukungan politik yang memadai. Tentu saja kepemimpinan seperti ini tidak akan sukses baik pemimpin tersebut laki-laki ataupun perempuan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Eagly dan Johnson, menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup berarti dalam perilaku kepemimpinan baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang berbeda hanya dari segi gaya kepemimpinan, perempuan cenderung menggunakan partisipatif dibanding laki-laki.

Perempuan dinilai lebih memiliki empati, belas kasih, mengayomi, lebih peduli untuk membangun kesatuan, inklusif dan peduli terhadap hubungan interpersonal. Nilai-nilai tersebut kemudian memunculkan gaya kepemimpinan yang lebih terbuka dan apa adanya.

Dalam penelitian lain yang dilakukan Eva Maizara dkk pada bawahan terhadap persepsi mereka terhadap gender pemimpin, hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak terlalu dipermasalahakan karena yang terpenting adalah kompetensi dan kepribadian pemimpin tersebut dalam menjalankan perannya. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kompetensi yang sama untuk menjadi pemimpin, hanya saja mungkin dalam gaya dan penerapannya perempuan memiliki kekuatan berbeda dengan yang dimiliki oleh laki-laki.

Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya mempunyai kompetensi yang sama dalam memimpin. Keduanya mempunyai potensi kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam memimpin organisasi. Yang disayangkan adalah masih adanya diskriminasi, bias, prasangka dan stereotip yang tidak adil

bagi perempuan dan justru menghambat potensi tersebut.

Karenanya diperlukan revolusi total baik dalam sisi eksternal maupun internal. Perempuan sendiri harus terus mengembangkan potensi diri baik dari aspek fisik, intelektual, maupun mental spiritual sehingga memiliki posisi tawar yang kuat dan sejajar dengan laki-laki.

Tentu ini perlu didukung dengan akses pendidikan yang memadai dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat perlu memberikan dukungan yang suportif agar potensi perempuan juga dapat berkembang secara maksimal sehingga memberikan semangat daya saing dan keberanian serta meningkatkan partisipasi perempuan di ruang publik.